

EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KOTA BONTANG KALIMANTAN TIMUR

Rachmat Ashari - 14010116140044

rahmatashari1003@gmail.com

**Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Budi Setiyono, S.Sos, M.
Pol.Admin, Ph.D**

budisetiyono@lecturer.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerrintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang**

ABSTRAK

Pengembangan destinasi wisata memerlukan perencanaan yang bertujuan untuk memandu jalannya pengembangan tersebut melalui Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi RIPPDA Kota Bontang sehingga dapat diketahui kendala dan efektivitas RIPPDA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data wawancara dan observasi. Analisis data meliputi empat tahapan yaitu: pengumpulan data, reduksi, dan kategorisasi data, display data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 6 tahapan yang dilalui dalam melakukan proses evaluasi RIPPDA Kota Bontang yaitu melakukan rapat, revisi dan review RIPPDA yang pertama, mengadakan sidang paripurna dengan DPRD, tahap berikutnya dilakukan revisi dan review RIPPDA untuk yang kedua kalinya, langkah kelima yaitu melakukan review RIPPDA yang ketiga atau final oleh DPRD, dan tahap yang terakhir yaitu melakukan pengesahan RIPPDA. Hasil evaluasi RIPPDA Kota Bontang ditelaah dari empat kebijakan dan program yaitu: evaluasi kebijakan dan program destinasi pariwisata, evaluasi kebijakan dan program pemasaran pariwisata, evaluasi kebijakan dan program industri dan evaluasi kebijakan dan program lembaga. Kendala yang ditemukan dalam kegiatan evaluasi RIPPDA yaitu data Kota Bontang dan data pariwisata Kota Bontang tidak sesuai, kesulitan dalam melakukan susunan RAPERDA, penyesuaian undang-undang terkait pembangunan nasional, dan menyesuaikan kebutuhan kebijakan dan program selama lima tahun.

Kata Kunci: Evaluasi, RIPPDA, Pengembangan, Pariwisata Daerah

ABSTRACT

The development of tourist destinations requires planning that aims to guide the development process through the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA). This study aims to evaluate the RIPPDA of Bontang City so that the constraints and effectiveness of the RIPPDA can be known. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection interviews and observations. Data analysis includes four stages, namely: data collection, data reduction and categorization, data display and data verification or conclusion drawing.

The results of the study found that there were 6 stages that were passed in the process of evaluating the RIPPDA of Bontang City, namely conducting a meeting, revising and reviewing the first RIPPDA, holding a plenary session with the DPRD, the next stage was revising and reviewing the RIPPDA for the second time, the fifth step was conducting a review. The third or final RIPPDA by the DPRD, and the last stage is to ratify the RIPPDA. The results of the Bontang City RIPPDA evaluation were reviewed from four policies and programs, namely: evaluation of tourism destination policies and programs, evaluation of tourism marketing policies and programs, evaluation of industrial policies and programs and evaluation of institutional policies and programs. Obstacles found in the RIPPDA evaluation activities were that the City of Bontang data and tourism data of Bontang City did not match, difficulties in drafting the RAPERDA, adjustments to laws related to national development, and adjusting the needs of policies and programs for five years.

Keywords: *Evaluation, RIPPDA, Development, Tourism Region*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki sumber daya alam yang beragam di setiap wilayahnya. Potensi Negara Indonesia juga beraneka ragam

seperti dalam hal pariwisata, budaya dan keseniannya. Potensi tersebut seharusnya dikembangkan agar menjadi daya tarik tersendiri bagi mancanegara. Seperti yang kita ketahui bahwa turis datang ke Indonesia memiliki tujuan utama yaitu untuk melakukan pariwisata (Yoeti, 1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu kata “pari” dan kata “wisata”. Pari memiliki arti banyak, berulang kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini memiliki sinonim dengan kata “*travel*” dalam Bahasa Inggris. Sehingga dengan kata lain “pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*tour*”.

Kegiatan kepariwisataan diselenggarakan dengan tujuan untuk memajukan dan menambah pendapatan daerah, mengembangkan dan memberikan kesempatan berusaha serta penyebaran lapangan kerja, memotivasi laju pembangunan daerah, mempromosikan dan mendayagunakan pesona pariwisata dan tujuan wisata di Kota Bontang. Pembangunan dan pengembangan daerah wisata dilakukan dengan pendekatan kemajuan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang mengarahkan kepada pengembangan dan pembangunan wilayah, bertitik berat pada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang melingkupi berbagai perspektif seperti sumber daya manusia, jual beli dan *marketing*, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas area, pemberdayaan usaha kecil dan ekonomi serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Dalam UU. No 10/2009 telah ditegaskan bahwa kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional dan *global*. Maka dengan demikian seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Pariwisata memiliki fungsi penting bagi suatu daerah karena dapat memicu perkembangan daerah tersebut. Adikampana (2017) juga menjelaskan bahwasanya pariwisata dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat terutama dalam kenaikan tingkat perekonomian seperti adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan melakukan usaha. Tidak hanya untuk masyarakat saja adanya pariwisata ini juga dapat meningkatkan perekonomian bagi Kota atau Kabupaten setempat, dapat meningkatkan sosial dan budaya, dan meningkatkan pertumbuhan pertahanan keamanan (Purnomo dan Puntorini, 2018). Mengacu pada hal tersebut maka potensi sumber daya wisata daerah perlu dikembangkan secara terintegrasi dalam perencanaannya dan dilaksanakan secara sinergis dengan pembangunan di sektor lainnya.

Perencanaan pada hakikatnya merupakan tahapan dalam memilih apa yang ingin diperoleh pada masa tertentu, mencakup waktu tertentu serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Rudianto, 2009: 52). Robbins dan Coulter (dikutip dari Trisnawati dan Sule, 2005: 96) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta mendefinisikan struktur perencanaan secara garis besar untuk menggabungkan dan menyelaraskan seluruh kegiatan organisasi hingga terwujudnya visi, misi serta tujuan organisasi.

B. Kerangka Teori

Teori Evaluasi

Worthen dan Sanders (1979:1) menyatakan evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Dalam kehidupan evaluasi sudah banyak dipakai dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan judul yang berkaitan dengan evaluasi. Dengan adanya penelitian terhadap evaluasi perencanaan ini diharapkan dapat mengenali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rencana kerja di bidang pariwisata Kota Bontang selama ini.

Purwanto (2002) memberikan pengertian bahwa evaluasi secara garis besar dapat dikatakan sebagai pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Dengan kata lain, evaluasi bisa diartikan sebagai metode *planning*, mendapatkan, dan memfasilitasi sumber informasi yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pilihan-pilihan keputusan. Berdasarkan teori di atas dapat dikatakan bahwa evaluasi berguna untuk memberikan penilaian terhadap program kerja pemerintah baik itu positif atau negatif.

National center for chronic disease prevention and health promotion dalam CDC *Workbook* tahun 2011 juga mengungkapkan bahwa evaluasi perencanaan

merupakan suatu kegiatan dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi terkait rancangan program-program yang akan dilakukan seperti daftar program yang akan dilakukan, cara melaksanakan program, tujuan dilaksanakan program, manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan program.

Terdapat tiga tipe evaluasi perencanaan menurut Oliveira & Pinho, 2010a yaitu *ex ante* atau *a priori*, *on going* dan *ex post*.

Perencanaan dan Paradigma Perencanaan

Pengertian perencanaan atau *planning* menurut Suandy (2001:2) adalah suatu tahapan pemilihan tujuan lembaga dan kemudian menyediakan dengan jelas program-program, metode-metode, dan operasi yang dibutuhkan untuk terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan tujuan dari perencanaan pengembangan pariwisata yang ada di Kota Bontang berguna untuk menentukan strategi dan taktik yang memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan kawasan wisata. Organisasi atau instansi terkait memiliki peran besar dalam perencanaan pengembangan pariwisata seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) dan didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Selanjutnya adalah paradigma perencanaan yang dikemukakan oleh Campbell dan Fainstein (1996) dengan menggunakan paradigma *rasionalisme* karena jenis paradigma ini berfungsi meneguhkan pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Fungsi *planning* atau perencanaan disini merupakan suatu kegiatan secara umum, komunitas yang mendeskripsikan dan mengatur pengembangannya sendiri dengan cara yang logis. Esensi *planning* atau perencanaan dalam model ini adalah objektivitas atau mengimplementasikan hal yang logis, melaksanakan pada keadaan yang natural, memiliki gambaran yang jelas dan menyeluruh, acara-acaranya disusun untuk dievaluasi dan menyampaikan kesempatan bagi adanya aktifitas pemecahan masalah (*problem solving*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat juga harus memiliki akal dan selalu mengawasi perencanaan pembangunan khususnya bidang pariwisata yang ada di Kota Bontang. Berdasarkan luas cakupan masalah dan jangkauan waktunya perencanaan dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk:

1. Rencana *global*, ini merupakan penentuan tujuan yang menyeluruh atau keseluruhan dan yang menyangkut jangka panjang dari organisasi tersebut sebagai keseluruhan atau totalitas (Gitosudarmo, 1990:136).
2. Rencana strategis, rencana ini diatur untuk menetapkan tujuan-tujuan suatu aktifitas yang memiliki makna diplomatis dan berukuran jangka panjang. Makna strategis dalam pembentukan rencana ini adalah untuk membentuk dan

menentukan urutan aspek mana yang akan dicapai terlebih dahulu dan berikutnya. Untuk membentuk rencana strategis kita harus memahami keadaan saat ini dan dikaitkan dengan pembangunan atau perkembangan masa depan yang sangat memungkinkan terjadi dan bagaimana upaya kita untuk mengganti keadaan sesuai tujuan yang diinginkan. Dilihat dari format waktunya perencanaan strategis merupakan perencanaan atau *planning* dalam waktu yang lama dan biasanya dibuat oleh sebuah badan yang mengatur dari atas. Perencanaan strategis mengenai suatu ketetapan bertujuan untuk menentukan tujuan apa yang ingin diperoleh oleh perusahaan secara keseluruhan, dan instrumen apa yang dipakai untuk memperoleh tujuan tersebut (Gitosudarmo, 1990:140).

3. Rencana operasional, yaitu meliputi perencanaan terhadap kegiatan kegiatan operasional yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis (Gitosudarmo, 1990:142).

Teori Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Menurut Winarno (2007:15), kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak golongan yang berpendapat bahwa pengertian tersebut dijelaskan masih sangat umum untuk dipahami, karena apa yang diartikan dengan kebijakan publik dapat melingkupi banyak macam. Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas termasuk dengan lingkungan, oleh karena itu

kebijakan untuk melakukan evaluasi perencanaan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang sangat menjanjikan. Pemerintah menjadi tahu apa saja hambatan- hambatan yang ada pada sektor pariwisata sehingga pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadikan pariwisata Kota Bontang lebih baik lagi. Kebijakan publik bisa dipandang dengan suatu hal apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 2009). Dapat disimpulkan kajian ini menitik beratkan bahwa kebijakan publik adalah tentang figur dari “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan aspirasi pemerintah atau tokoh publik semata. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pariwisata termasuk sebuah tindakan dalam tujuan mengembangkan pariwisata dan kebijakan ini memiliki kualitas dan kuantitas untuk memberikan perencanaan yang baik bagi sektor pariwisata.

Metode Penelitian

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif. Metode ini disesuaikan dengan jenis penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif (Wardiyanta, 2006:5).

Pembahasan

Evaluasi menurut *National Center for Chronic Disease Prevention and Healt Promotion* dalam CDC Workbook tahun 2011 merupakan suatu kegiatan dalam mendeskripsikan dan mengevaluasi terkait rancangan program-program yang akan dilakukan seperti daftar program yang akan dilakukan, cara melaksanakan program,

tujuan dilaksanakan program, manfaat atau keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaan program. Terdapat 3 tipe evaluasi yaitu *ex ante*, *on going*, dan *ex post* (Oliveira & Pinho, 2010a). Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan merupakan evaluasi kebijakan sebelum kebijakan diimplementasikan, terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi kebijakan yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan dari kebijakan dan program yang akan dievaluasi, kemudian analisis permasalahan, deskripsi dan standarisasi kegiatan, lakukan pengukuran pada setiap tingkatan perubahan yang terjadi, selanjutnya menentukan apakah perubahan yang terjadi karena proses evaluasi atau penyebab lainnya, dan identifikasi beberapa indikator lain yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak tertentu (Sunchman, dalam Rusmini, 2019).

Pada penelitian ini tahapan atau langkah yang dilakukan dalam evaluasi kebijakan dilakukan dengan lima tahapan, diantaranya yaitu melakukan rapat untuk membahas kebijakan-kebijakan dan program yang perlu di tinjau kembali, melakukan revisi kemudian review kembali, melakukan sidang dalam pembahasan lanjutan terakit dengan hasil revisi, jika rasa masih perlu di tinjau kembali maka dilakukan revisi dan review kembali hingga pada tahap pengesahan RIPPDA.

Kelima tahapan diatas dikemukakan oleh A selaku analis pariwisata beliau menyatakan bahwa:

“Terdapat beberapa tahap yang dilalui untuk melakukan evaluasi RIPPDA sampai ditetapkannya RIPPDA, tahapan tersebut yaitu melakukan rapat dengan tim (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, bagian Hukum Sekda dan Bapelitbang), melakukan merevisi dan mengreview (RIPPDA), kemudian mengadakan sidang paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melakukan revisi dan mengereview kembali (RIPPDA) dengan tim (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, bagian Hukum Sekda dan Bapelitbang), selanjutnya melakukan review RIPPDA dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Tujuan dari kegiatan evaluasi ini yaitu untuk menyusun ulang produk RIPPDA yang sesuai dengan kebutuhan sehingga pembangunan dan pengembangan pariwisata Kota Bontang dapat terus meningkat melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata, kemudian dalam pengembangan kegiatan pemasaran yang dinilai efektif serta efisien, dan pengembangan industri pariwisata karena pada beberapa kebijakan dan program atau produk dalam RIPPDA masih dinilai kurang sesuai dengan kondisi dan situasi dilapangan sehingga masih perlu dikembangkan kembali. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan melalui media angket atau kuesioner yang dibagikan kepada 5 responden, hasilnya menjelaskan bahwa 5 dari 5 responden atau sama dengan 100% responden menyatakan bahwa strategi serta sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata sudah memadai namun dalam beberapa kebijakan dan program masih perlu ditinjau ulang, 4 dari 5 responden atau 80% menyatakan bahwa masih banyak kebijakan yang harus dievaluasi atau ditinjau kembali terkait dengan pengembangan destinasi wisata dan pengembangan industri. Hasil angket juga menjelaskan bahwa 4 dari 5 responden atau sama dengan 80% masih terdapat program-program dalam pengembangan pariwisata yang harus diperbaharui salah satunya yaitu program pemasaran.

Kesimpulan

Latar Belakang dibentuknya RIPPDA karena sebagai landasan dalam pengembangan tempat wisata di Kota Bontang sehingga tercipta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan., seperti yang diketahui bahwa pariwisata merupakan sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian daerah, dan nasional sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, selain itu dapat meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan memperat persahabatan antar bangsa.

Latar Belakang dilakukannya evaluasi kebijakan RIPPDA karena terdapat beberapa kebijakan dan program seperti kebijakan dan program pemasaran, pengelolaan pajak dan restribusi objek wisata, serta beberapa produk hokum yang kurang sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Terdapat 6 tahapan yang dilalui dalam melakukan proses evaluasi RIPDDA Kota Bontang yaitu melakukan rapat antara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, bagian Hukum Sekda dan Bapelitbang untuk membahas tujuan-tujuan dari kebijakan dan program RIPPDA, kemudian dilakukan revisi dan review (RIPPDA) yang pertama, selanjutnya mengadakan sidang paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memabahs hasil temuan baru dan hasil revisi serta review RIPPDA, tahap berikutnya melakukan revisi dan mengereview (RIPPDA) untuk yang kedua kalinya oleh DISPOPAN, bagian Hukum Sekda dan Bapelitbang,

langkah kelima yaitu melakukan review RIPPDA yang ketiga atau final oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan tahap yang terakhir yaitu melakukan pengesahan RIPPDA”.

Proses yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dan pihak lainnya selama evaluasi RIPPDA dilakukan yaitu melakukan revisi dan review mengenai naskah akademik, rancangan peraturan pariwisata daerah, kebijakan dan program pariwisata Kota Bontang, jumlah kunjungan pariwisata selama 5 tahun, dan objek daya tarik wisata mana yang akan dijadikan sebagai sasaran kebijakan dan program.

Hasil evaluasi RIPPDA Kota Bontang ditelaah dari empat kebijakan dan program yaitu: evaluasi kebijakan dan program destinasi pariwisata, evaluasi kebijakan dan program pemasaran pariwisata, evaluasi kebijakan dan program industri dan evaluasi kebijakan dan program lembaga

Kendala yang ditemukan dalam kegiatan evaluasi RIPPDA yaitu dalam melakukan penyesuaian data Kota Bontang dan data pariwisata Kota Bontang, selanjutnya kesulitan dalam melakukan susunan RAPERDA, menyesuaikan undang-undang terkait pembangunan nasional, provinsi pariwisata daerah, dan menyesuaikan kebutuhan kebijakan dan program selama lima tahun. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan kerjasama dengan Bapelitbang untuk memenuhi data yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana I.Made. 2017. Pariwisata Berbasis Masyarakat. Cakra Press : Bali
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Alexander E.R. 2006. Evaluation is Planning : Evolution and Prospects. USA :
Ashgate
- Andastry, Fonita & Idajati, H. 2016. Karakteristik Kawasan Wisata Kampung
Laut Bontang Koala Berbasis Ekowisata. Jurnal Teknik ITS Vol.5 (2).
- Arikunto. (2003). *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arfandi. 2015. Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta:
Medpress (Anggota IKAPI).
- Budiman, P.W. *et all.* (2010). Pelestarian Pola Permukiman Kampung Bontang
Kuala, Bontang. Arsitektur E-Journal Vol.3 (1).
- Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Diakses melalui
<http://dispopar.bontangkota.go.id> Pada tanggal 2 Februari 2021.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Diakses melalui
<http://disdukcapil.bontangkota.go.id> Pada tanggal 8 Maret 2021.
- Erni Trisnawati, Sule. 2005. Pengantar Manajemen, Jakarta. Kencana.
- Fainstein, Campbell. (1996). *Readings in Planning Theory*.
- Guyadeen, Dave & Sesons, Mark. 2016. Evaluation Theory and Practice:
Comparing Program Evaluation and Evaluation in Planning. Canada :
University of Waverloo.
- Hani Handoko, 1999, Manajemen, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

- Hardiyana, Atikah. (2017). Perubahan Pola Pemanfaatan Ruang Kampung Bontang Kuala, Bontang, Kalimantan Timur. Skripsi Astitektur Konsentrasi Desain Pemukiman dan Kota.
- Hermansyah & Sunaryo, Busori. (2016). Pengembangan *Marine Ecotourism* “Bontang Kuala” melalui *Community Development* PT. Badak NGL. *Economics Dvelopment Analysis Journal* Vol. 5 (1).
- Humas Provinsi Kalimantan. (2020). Pemprov Ubah Draft RIPPARDA Berbasis Destinasi. Diakses melalui situs <https://kaltimprov.go.id/berita/pemprov-ubah-draft-ripparda-berbasis-destinasi>
- Indriyo Gitosudarmo. 1990. Prinsip Dasar Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta.
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2010). *Kerangka Acuan Kerja RIPPDA*. Bontang.
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2015). *Lakip DISBUDPAR*. Bontang.
- Kerangka Acuan Kerja RIPPDA. 2010. Bontang.
- Kotler Armstrong. (2008). *Prinsip-prinsip pemasaran* (Vol. 12). Jakarta: Erlangga.
- Kota Bontang dalam Angka 2020. BPS Kota Bontang
- Kecamatan Bontang Utara dalam Angka 2020. BPS Kota Bontang
- M. Ngalim Purwanto. (2002). *Prinsip - prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Mokodongan, Rohaya Putri et al. 2019. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mobagu. *Jurnal Spasial* Vol.6 (1)